



GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

- Yth. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Rekan-Rekan Pers Media Cetak dan Elektronik; Hadirin undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Shalawat dan salam, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihiwasalam beserta keluarga dan para sahabatnya, Semoga segala pedoman yang telah beliau tinggalkan,

selalu membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami melaksanakan kewajiban konstitusional selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Nota Pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum kami lanjutkan, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Forkopimda Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan kerjasamanya yang sangat baik, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2018, sebagai tahun ketiga masa kepemimpinan kami bersama Bapak Nasrul Abit selaku Wakil Gubernur, telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat atas dukungan dan partisipasinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala OPD beserta jajaran aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang telah bekerja keras membantu kami dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah kami jabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Kami berharap kiranya laporan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang kami lakukan selama Tahun 2018, serta menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Para Peserta Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum kami lanjutkan untuk menyampaikan gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2018, terlebih dahulu perlu kami kemukakan dalam Rapat Paripurna ini, bahwa realisasi APBD Tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini, merupakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 yang masih tentatif karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2018 saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, namun telah di-*review* oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini jika dibandingkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, realisasinya terhadap beberapa pos Laporan Realisasi Anggaran, akan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh hasil koreksi dari Audit Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap validasi angka LKPj Tahun Anggaran 2018 ini.

Namun demikian, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2018 nantinya akan disampaikan tersendiri setelah dilakukannya audit oleh BPK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu, beberapa data kondisi umum Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada LKPj Tahun 2018 ini masih merupakan data yang menggambarkan kondisi tahun 2017, terutama terkait dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) karena saat penyusunan LKPj ini, datanya belum dirilis secara resmi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang merupakan penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Nota Pengantar yang kami bacakan ini merupakan ringkasan dari buku LKPj Tahun Anggaran 2018

yang telah diberikan kepada seluruh anggota dewan dan dalam penyajiannya kami kelompokkan ke dalam enam bagian, yaitu :

1. Mengenai Gambaran Umum Kondisi Provinsi Sumatera Barat;
2. Mengenai Kebijakan Pemerintahan Daerah,
3. Mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Mengenai capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
5. Mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan,
6. Mengenai Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Bagian pertama, tentang Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil sensus penduduk dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan penduduk pada Tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.469.083 jiwa dengan rincian penduduk jumlah laki-laki sebanyak 2.766.677 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.702.406 jiwa.

Sedangkan hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, memperlihatkan penduduk Sumatera Barat pada tahun 2018 totalnya adalah 5.259,50 ribu jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 2.617,20 ribu jiwa dan penduduk perempuan 2.642,30 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru, dimana IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk antara lain dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),

pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living).

Dari hasil penghitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat adalah 71,24 dengan rincian komponen angka harapan hidup saat lahir adalah 68,78 tahun, harapan lama sekolah 13,94 tahun, dan rata-rata lama sekolah 8,72 tahun dengan pengeluaran perkapita disesuaikan Rp.10.306 (Ribu/Orang/Tahun). Jika dibandingkan dengan IPM rata-rata nasional maka IPM Provinsi Sumatera Barat sudah lebih tinggi dari IPM rata-rata nasional yang berada pada angka 70,81. Untuk 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2017, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 81,58 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 59,25.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Februari 2018 tercatat sebesar 72,80 persen, meningkat 2,38 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2018, TPAK laki-laki sebesar 83,01 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 55,44 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK perempuan meningkat sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK Laki-Laki menurun 0,04 persen poin.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan tiga lapangan pekerjaan utama masih mendominasi penyerap tenaga kerja terbanyak di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 30,46 persen, kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan sebanyak 18,53 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 14,11 persen.

Perekonomian di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi di Kota Padang terjadi karena adanya peningkatan harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 0,72 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,91 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,47 persen, kelompok sandang sebesar 0,64 persen, dan kelompok pendidikan,

rekreasi dan olah raga sebesar 0,43 persen. Sementara itu kelompok kesehatan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 0,40 persen dan 0,43 persen. Di Kota Bukittinggi inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran antara lain; kelompok bahan makanan sebesar 1,60 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,20 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,57 persen, kelompok sandang sebesar 0,26 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,23 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,15 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,65 persen.

Nilai ekspor Sumatera Barat Januari 2017 sampai Januari 2018 tercatat pada BPS Provinsi Sumatera Barat dalam Berita Resmi Statistik Tanggal 15 Februari 2018 sebesar US\$ 140,36 juta atau turun sebesar 30,31 % dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar US\$ 201,38 juta.

Sementara dari nilai Impor Sumatera Barat selama bulan Januari 2018 mencapai US\$ 62,82 juta, mengalami peningkatan sebesar 40,75 persen dibandingkan dengan nilai impor pada bulan Desember 2017 yang tercatat senilai US\$ 44,63 juta. Sementara itu jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor Januari 2018 naik hampir 40,05%. Golongan barang yang terbesar diimpor pada bulan Januari 2018 adalah bahan bakar mineral sebesar US\$ 49,15 juta.

Hadirin dan Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Bagian kedua, yang akan kami kemukakan adalah mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang mempedomani RPJMD Tahun 2016-2021, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini. Prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2018 adalah kelanjutan dari prioritas Tahun 2017 yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan perbaikan-perbaikan yang diselaraskan dengan Program Nawacita Presiden, difokuskan pada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui

pendidikan dan kesehatan, peningkatan kedaulatan pangan, pengembangan kemaritiman dan kelautan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mendorong peningkatan konektivitas dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup serta penanganan kemiskinan dan daerah tertinggal yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan tahun kedua efektifnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama serta Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2018 tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) tahun 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun 2018, yang kemudian ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dan APBD Perubahan Tahun 2018 yang ditetapkan bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Sebagai salah satu tolak ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018, telah berhasil mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, sehingga secara keseluruhan Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut semenjak hasil opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012. Keberhasilan ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah daerah dan didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang sangat efektif dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi kesuksesan ini.

Mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Kondisi umum pendapatan daerah Tahun 2018 secara ringkas dapat digambarkan bahwa :

- a. Kontribusi Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih tetap menjadi komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat tergantung pada pertumbuhan kendaraan baru dari jenis sedan, jeep dan minibus.
- c. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tergantung pada harga dan jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM).
- d. Pajak air permukaan yang terbesar berasal dari PLN. Penerimaan ini tergantung pada jumlah pemakaian air oleh PLN.
- e. Sektor Retribusi Daerah sampai saat ini peranannya masih kecil terhadap PAD karena sebagian besar berada pada pemerintah kabupaten/kota. Apalagi dengan dialihkannya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum

Daerah yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menjadi penerimaan lain-lain PAD yang sah.

- f. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam jangka pendek belum terlalu berkontribusi signifikan terhadap PAD.

Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Optimalisasi aset dan kekayaan daerah serta Pengembangan BUMD, serta Penyesuaian tarif baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan menganut prinsip-prinsip tidak memberatkan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan mudah dilaksanakan.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.6.464.256.196.560,- mampu direalisasikan sebesar Rp.6.292.280.496.025,90 (97,34 persen), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.343.568.641.600,- dapat direalisasi sebesar Rp.2.275.082.933.586,90 (97,08 persen) lebih rendah dari realisasi PAD Tahun 2017 yaitu sebesar 102,97 persen, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp.1.736.164.000.000,- dapat direalisasi sebesar Rp.1.797.677.158.644,95 dengan capaian kinerja 103,54 persen.

Sedangkan untuk retribusi daerah, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.16.909.923.600,00 dapat direalisasi sebesar Rp.19.499.277.108,- dengan capaian kinerja sebesar 115,27 persen.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target penerimaan sebesar Rp.122.000.000.000,- dapat direalisasi sebesar Rp.81.374.332.350,87 dengan capaian kinerja sebesar 66,70 persen.

Untuk Penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan target Rp.468.494.718.000,- mampu direalisasikan sebesar Rp.376.532.165.483,08 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,37 persen.

- b. Penerimaan dari dana perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian, ditargetkan Rp.4.032.658.324.960,- dapat direalisasikan sebesar Rp.3.930.814.210.887,- (97,47 persen).

Tidak tercapainya target penerimaan ini karena adanya beberapa sumber penerimaan yang tidak terealisasi yang disebabkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang membatasi Daerah melakukan ekstensifikasi Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan Daerah dari sektor retribusi, karena pada dasarnya pemungutan retribusi selalu berkaitan dengan pelayanan dan perizinan yang kewenangannya lebih banyak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Retribusi Daerah yang beralih kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi seperti Retribusi Kepelabuhan potensinya justru lebih kecil dari retribusi Daerah yang beralih kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota seperti retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dan Retribusi Terra Ulang.
- 4) Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah disebabkan karena belum membaiknya Kondisi dan perkembangan BUMD.
- 5) Aset Daerah yang bersifat idle belum dikelola secara optimal, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.

- 6) Penerimaan BBNKB sangat didominasi oleh penerimaan kendaraan bermotor baru.
 - 7) Penerimaan PBB-KB tergantung pada harga dan jumlah pemakai BBM. Harga BBM tergantung Pemerintah Pusat.
 - 8) Pajak Air Permukaan yang terbesar berasal dari PLN. Penerimaan ini tergantung pada debit air danau yang dapat dimanfaatkan oleh PLN untuk menghasilkan KWH listrik, yang sewaktu waktu bisa turun bila musim kemarau.
- c. Rencana penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus ditargetkan sebesar Rp.88.029.230.000,- direalisasikan sebesar Rp.86.383.351.552,- dengan capaian kinerja sebesar 98,13 persen.

2. Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp.6.895.649.672.145,77 direalisasikan sebesar Rp.6.267.880.269.291,09 (90,90 persen) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp.4.004.468.893.385,77 direalisasi sebesar Rp.3.650.739.927.272,- dengan capaian kinerja sebesar 91,17 persen, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.891.180.778.760,- direalisasi sebesar Rp. 2.617.140.342.018,09 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,52 persen. Belanja langsung merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah, yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

3. Pembiayaan Daerah

Dalam tahun 2018, untuk kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp.531.142.740.208,77.

Pada APBD Tahun Anggaran 2018, yang semula diperkirakan mengalami defisit sebesar (Rp.431.393.475.585,77) namun sampai akhir tahun anggaran ternyata terdapat surplus sebesar Rp.502.109.578.343,72. Hal ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan efektifitas belanja daerah, yaitu dengan realisasi sebesar 91,17 persen.

Hadirin dan Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Pada bagian keempat, dapat kami sampaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan target indikator makro bidang pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, angka rata-rata lama sekolah 8,59 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,72 tahun pada tahun 2017.

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dilihat dari menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Berdasarkan data tenaga pendidik atau guru, adanya peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Jumlah guru jenjang SD/MI yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi adalah sebanyak 39.562 atau 92,72 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 90,99 persen. Jumlah guru jenjang SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi adalah sebanyak 24.040 atau 93,36 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 91,75 persen. Selanjutnya Jumlah guru jenjang SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi

adalah sebanyak 22.860 atau 96,52 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 92,61 persen.

Pada urusan kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diarahkan untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat peduli sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan telah memenuhi target sasaran strategis yang direncanakan.

Sasaran peningkatan mutu pelayanan dapat dilihat dengan indikator: *Pertama*, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.320 orang atau 69,49 persen, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 73,32 persen. *Kedua*, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.559 orang atau 82,07 persen, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 77,81 persen. *Ketiga*, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.474 jorong atau 77,57 persen, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 83,14 persen. *Keempat*, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, pada tahun 2017 adalah sebanyak 100 persen, jumlah ini sama dengan tahun 2017 yang hanya 100 persen. *Kelima*, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, pada tahun 2018 adalah sebanyak 100 persen, sama dengan tahun 2017 yang hanya 100 persen dan *Keenam*, Cakupan kunjungan bayi, pada tahun 2018 sebanyak 1.633 orang bayi atau 85,96 persen, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada pada angka 85,99 persen.

Pada urusan tata ruang, sasaran strategis diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan penataan ruang wilayah melalui indikator persentase kabupaten/kota yang penataan wilayahnya sesuai dengan penataan wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat, dengan kinerja sebesar 100%, sehingga pada saat ini Pemerintah Provinsi dan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan dengan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Barat,

meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat, serta berkurangnya kasus maksiat.

Sasaran-sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang telah menerapkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang aktif sebanyak 19 kabupaten/kota atau 100 persen, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya 13 kabupaten/kota atau 68 persen.

Indikator persentase kerusuhan yang terjadi yang dapat ditangani sesuai dengan aturan dicapai dengan kinerja 100 persen, dalam artian bahwa selama tahun 2017 tidak terjadi kerusuhan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja urusan sosial dilaksanakan dengan sasaran strategis Peningkatan Aksesibilitas yang memadai bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Tersedianya perumahan yang layak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penataan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkompetensi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hadirin dan Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Sesuai dengan amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dalam hal penyediaan pelayanan publik, daerah juga dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah menandatangani 32 Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama 20 MoU.

Kemudian berkaitan dengan Tugas Pemerintahan Umum lainnya yaitu pelaksanaan penegasan batas daerah, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis terus dilakukan dan menjadi prioritas Tahun 2018. Sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa batas daerah hasil penegasan batas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian kewenangan menetapkan batas berada pada pihak Kementerian Dalam Negeri sedangkan daerah berwenang mengusulkan hasil penegasan batas.

Sesuai dengan kewenangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi penegasan batas daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam LKPJ tahun sebelumnya, segmen batas daerah provinsi dan segmen batas daerah kabupaten/kota telah ditetapkan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 2 segmen batas daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu serta 17 segmen batas daerah kabupaten/kota.

Kemudian segmen batas daerah yang telah diusulkan untuk ditetapkan Permendagrinya pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 segmen batas kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Batas Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang;
- 2) Batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya;
- 3) Batas Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya;

Dan 2 segmen batas provinsi telah ditetapkan Permendagrinya, sebagai berikut :

- 1) Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara (Permendagri 53, 54, 55 Tahun 2018);
- 2) Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi (Permendagri 70, 71, 72,73 Tahun 2018).

Selanjutnya dapat kami jelaskan, berkenaan dengan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah Rp.405.635.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.372.681.760.585,- atau 91,88 persen. Secara rinci total anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat berjumlah Rp.180.206.551.000,- yang dialokasikan pada 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan dana sebesar Rp.169.096.774.730,- atau 93,83 persen.

Alokasi dana dekonsentrasi dimaksud bersumber dari 19 (sembilan belas) Kementerian/Lembaga yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri R.I.;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.;
3. Kementerian Kesehatan R.I.;
4. Kementerian Sosial R.I.;
5. Kementerian Ketenagakerjaan R.I.;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I.;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.;
8. Kementerian Pertanian R.I.;
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;
10. Kementerian Koperasi dan UMKM R.I.;
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga R.I.;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
13. Kementerian Pariwisata R.I.;
14. Kementerian Perindustrian R.I.;
15. Kementerian Perdagangan R.I.;
16. Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I.;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Perpustakaan Nasional R.I.; dan
19. Arsip Nasional R.I.

Selanjutnya, berkenaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.225.429.249.000,- dengan serapan sebesar Rp.203.584.985.855,- atau 90,31 persen. Anggaran tersebut dialokasikan pada 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang bersumber dari 5 (lima) Kementerian yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I.;
2. Kementerian Sosial R.I.;

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I.;
4. Kementerian Pertanian R.I.; dan,
5. Kementerian Koperasi dan UKM R.I

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai baik melalui APBD maupun APBN tersebut, Pemerintah Provinsi secara rutin melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, baik pada tingkat sektoral OPD maupun pada tingkat pemerintah daerah melalui Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, dengan Camat serta dengan Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Provinsi Sumatera Barat dengan segala dinamika dan tantangan pembangunannya, merupakan daerah yang sangat potensial untuk lebih kita kembangkan menjadi daerah maju yang tetap memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan filosofi penyelenggaraan otonomi daerah. Agar dapat mengenali potensi tersebut, maka kita semua sebagai pihak yang diberikan amanah sebagai penyelenggara negara dan pelayan bagi masyarakat di daerah, diharuskan untuk dapat menangkap dan memahami akar dari segala permasalahan *riil* yang ada pada tataran akar rumput masyarakat.

Di samping pencapaian berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2018 yang lalu, tentunya masih ada berbagai persoalan dan tantangan yang belum dapat diselesaikan secara lebih komprehensif, dan itulah hal-hal yang harus kita selesaikan selanjutnya.

Oleh karena itu, pada Tahun 2019 ini pada tahun keempat masa jabatan kami bersama Bapak Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, akademisi, swasta serta seluruh lapisan masyarakat, untuk dapat secara bersama-sama bersatu membangun Sumatera Barat.

Dengan kebulatan tekad serta memperkuat komitmen untuk membangun Sumatera Barat, kami yakin akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional, sehingga implementasi terhadap hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah benar-benar akan mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat yang kita cita-citakan bersama.

Demikianlah Nota Pengantar ini kami sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen LKPj Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku LKPj yang telah disampaikan dan akan dibahas oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Terimakasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, sesuai dengan visi kami yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala memberkati kita semua. Aamiin.

Billahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd

IRWAN PRAYITNO